

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang



Oleh :

FAIZHA NAKITA PASYAZADE

2017/17043113

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

***PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN)***

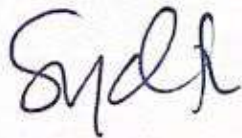
Nama : Faizha Nakita Pasyazade
TM/NIM : 2017/17043113
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2022

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE, Ak., M.Si., CA, Ph.D
NIP : 19800103 200212 2 001



Halmawati, SE., M.Si
NIP : 19740303 200812 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman)

Nama : Faizha Nakita Pasyazade

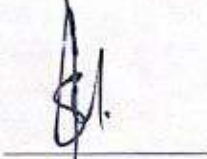
TM/NIM : 2017/17043113

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2022

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Halmawati, SE., M.Si	
Anggota	: Salma Taqwa, SE., M.Si	
Anggota	: Nurzi Sebrina, SE., Ak., M.Sc	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Faizha Nakita Pasyazade
Tahun Masuk/NIM : 2017/17043113
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/29 September 1999
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Pancing I No. A19 Medan Labuhan, Kota Medan
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis/dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah, apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Padang, Mei 2022
Saya yang menyatakan,

Faizha Nakita Pasyazade
NIM. 17043113

ABSTRAK

Faizha Nakita Pasyazade, 17043113/2017. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman)”

Pembimbing : Halmawati, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan sampel yang diambil sebanyak 86. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik bagi manusia menuju kebaikan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selain itu juga untuk memperluas ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang berguna bagi masyarakat. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa mencurahkan dan memberikan petunjuk dan karunia-Nya serta melimpahkan rahmat dan kenikmatan yang sempurna, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi awal kemandirian dan jalan menuju ridho-Mu. Aamiin.
2. Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam semoga tetap terlantun.
3. Teristimewa untuk Mama dan Papa yang sangat penulis sayangi, atas doa-doa luar biasa yang tidak ada hentinya serta kasih sayang yang tidak ternilai

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu memberi semangat serta dorongan pada setiap langkah untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan keyakinan bahwa penulis mampu memberikan yang terbaik. Semoga lelah Mama dan Papa dapat berbuah manis suatu hari nanti.

4. Ibu Halmawati, SE, M.Si selaku dosen pembimbing atas semua bimbingan, motivasi serta kesediaan waktu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si dan Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak selaku dosen penelaah dan dosen penguji yang telah memberikan penilaian, kritik, serta saran yang membantu saya untuk lebih baik lagi.
6. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph. D, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
7. Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan masukan dan arahan selama penulis melaksanakan perkuliahan.
8. Ibu dan bapak dosen lainnya yang sudah memberikan ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Faridh dan Fadila selaku adik kandung penulis yang selalu menyemangati dan menghibur penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Kakak Diah selaku guru les akuntansi yang sudah memberikan ilmu yang sangat berguna.
11. Abang Rizky selaku admin prodi akuntansi yang sudah membantu dan meladeni penulis dalam setiap pertanyaan.
12. Sahabat seperjuangan Velia, Tika, Fradella, dan Intan yang sudah sangat membantu dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Akuntansi C yang telah mengisi dunia perkuliahan saya.
14. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah membantu jalannya proses penelitian ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis.
16. Kepada Bangtan Sonyeondan, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook yang selalu memberikan kebahagiaan secara sederhana dan semangat secara tidak langsung kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. *Last but not least, I want to thank me, for believing in me, for doing all of this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka atas semua keikhlasan dalam membantu penyusunan skripsi ini. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran ke arah perbaikan sangat diperlukan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, Februari 2022

Faizha Nakita Pasyazade

NIM 17043113

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Teori Institusional Isomorfisme.....	12
2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.....	15
3. Standar Akuntansi Pemerintahan	19
4. Sistem Pengendalian Internal	23
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Hubungan Antar Variabel	38
1. Hubungan Antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	38

2. Hubungan Antara Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40
D. Kerangka Konseptual	42
E. Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Populasi dan Sampel	44
1. Populasi	44
2. Sampel	48
C. Jenis dan Sumber Data	49
1. Jenis Data	49
2. Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Variabel Penelitian	50
1. Variabel Dependen.....	50
2. Variabel Independen.....	51
F. Pengukuran Variabel.....	51
G. Instrumen Penelitian.....	53
H. Teknik Analisis Data	54
1. Analisis Deskriptif.....	54
2. Uji Kualitas Data.....	55
3. Uji Asumsi Klasik.....	56
4. Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Regression Analysis).....	57

5. Uji Hipotesis.....	58
I. Definisi Operasional.....	59
1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59
2. Standar Akuntansi Pemerintahan	59
3. Sistem Pengendalian Internal	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	61
B. Karakteristik Responden	62
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	63
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	64
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	64
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	65
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	66
C. Statistik Deskriptif	67
D. Deskripsi Variabel Penelitian.....	68
1. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	68
2. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan	70
3. Variabel Sistem Pengendalian Internal	73
E. Uji Kualitas Data.....	77
4. Uji Validitas	77
5. Uji Reliabilitas	78

F. Uji Asumsi Klasik	79
1. Uji Normalitas	79
2. Uji Multikolinearitas	80
3. Uji Heterokedastisitas	82
G. Analisis Regresi Linear Berganda	83
H. Uji Hipotesis	85
1. Koefisien Determinasi (R ²)	85
2. Uji Simultan (Uji F)	86
3. Uji Parsial (Uji T)	87
I. Pembahasan Hipotesis	90
1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	90
2. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan	94
B. Keterbatasan	94
C. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	103
1. Kuesioner	104
2. Tabulasi Data	114
a) Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	114
b) Penerapan Sistem Pengendalian Internal (X2)	116

c) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).....	118
3. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kampus	122
4. Surat Izin Penelitian Dari Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar opini LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	32
Tabel 3.1 SKPD Kabupaten Padang Pariaman	45
Tabel 3.2 Pengukuran Variabel.....	52
Tabel 3.3 Instrumen Penelitian	53
Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	61
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	63
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	64
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	65
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	66
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	66
Tabel 4.8 Deskriptif Tanggapan Responden.....	67
Tabel 4.9 Tabel Distribusi Frekuensi Kualitas Laporan Keuangan	69
Tabel 4.10 Tabel Distribusi Frekuensi Standar Akuntansi Pemerintahan	71
Tabel 4.11 Tabel Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Internal	74
Tabel 4.12 Uji Validitas	77
Tabel 4.13 Uji Reliabilitas	79
Tabel 4.14 Uji Normalitas.....	80
Tabel 4.15 Uji Multikolinearitas	81
Tabel 4.16 Uji Heterokedastisitas	82

Tabel 4.17 Analisis Regresi Linear Berganda.....	83
Tabel 4.18 Uji Koefisien Determinasi	86
Tabel 4.19 Uji F	87
Tabel 4.20 Uji T	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah perwujudan dari pertanggungjawaban oleh suatu entitas dalam kepengurusan sumber daya ekonomi. Laporan keuangan yang telah disajikan harus disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan agar laporan keuangan yang tersaji dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau entitas lainnya. Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan dalam suatu entitas pelaporan yang memiliki manfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan (Lusi, 2012).

Pemerintah daerah dan setiap entitas wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan yang dialami oleh entitas tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, pertanggungjawaban atas wewenang yang dibebankan kepada pemerintah daerah adalah dengan menyajikan LKPD. Laporan keuangan pada pemerintahan daerah memiliki tujuan untuk merealisasikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah daerah akan berguna bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

Informasi yang telah tersaji dalam laporan keuangan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Pemerintah daerah wajib memberikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas sangat diandalkan oleh pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan yang memiliki karakteristik berikut yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipercaya. Relevan yang dimaksud adalah memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Keandalan memiliki arti yaitu informasi yang tersaji sudah bebas dari kesalahan yang material. Dapat dibandingkan berarti pengguna laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan pada setiap periode. Selanjutnya, dapat dipahami mengandung arti dimana laporan keuangan memiliki informasi yang dapat dipahami oleh para pengguna.

Tabel 1.1 Daftar opini LKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018

No.	Entitas pemerintah daerah	Opini tahun 2018	No.	Entitas pemerintah daerah	Opini tahun 2018
1.	Provinsi Sumatera Barat	WTP	11.	Kota Padang	WTP
2.	Kota Pariaman	WTP	12.	Kabupaten Padang Pariaman	WDP

3.	Kabupaten Sijunjung	WTP	13.	Kabupaten Pasaman	WTP
4.	Kabupaten Pesisir Selatan	WTP	14.	Kabupaten Pasaman Barat	WTP
5.	Kabupaten Solok	WTP	15.	Kabupaten Agam	WTP
6.	Kabupaten Solok Selatan	WTP	16.	Kota Padang Panjang	WTP
7.	Kota Solok	WTP	17.	Kota Bukittinggi	WTP
8.	Kota Sawahlunto	WTP	18.	Kabupaten Tanah Datar	WTP
9.	Kabupaten Dharmasraya	WTP	19.	Kota Payakumbuh	WTP
10.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	WTP	20.	Kabupaten Lima Puluh Kota	WTP

Sumber: www.sumbar.bpk.go.id (tahun 2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa hampir seluruh entitas pada provinsi Sumatera Barat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Padang Pariaman menjadi satu-satunya pemda yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Dalam LKPD tersebut BPK menemukan terdapat selisih kurang saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp41,82 juta pada pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam saldo Kas di Kas Daerah terdapat sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang seharusnya diperuntukan sebagaimana yang telah ditetapkan, tetapi dipergunakan untuk membiayai belanja yang bukan menjadi beban pengeluaran DAK Non Fisik. Seharusnya sisa dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan DAK

Non Fisik tahun berikutnya. BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengakui bahwa terdapat Utang Pegawai sebesar RP23,04 miliar dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp184,86 juta pada Neraca 31 Desember 2018, serta mengakui Beban Pegawai sebesar Rp23,04 miliar dan Beban Pemeliharaan sebesar Rp184,86 juta. Namun Tambahan Penghasilan Pegawai Rp23,04 miliar dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp184,86 juta tidak dianggarkan dalam APBD TA 2018 sehingga tidak dapat menjadi beban APBD. Pengakuan utang dan beban oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak mengacu pada peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Sampai saat pelaporan, belum terdapat kepastian tindak lanjut penyelesaian kewajiban atas pengakuan utang-utang tersebut. BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa masih rendahnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 yang dilakukan aparatur pemerintah karena terdapat ketidakjelasan penggunaan dana sehingga merugikan keuangan negara. Hal ini diduga belum dilaksanakan secara maksimal penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal yang kurang baik.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 yang mana pada tahun 2020 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), peneliti ingin meneliti lebih lanjut apa yang

menyebabkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapat opini WDP pada tahun 2018 lalu.

Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuannya adalah agar mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas bagi pemerintah pusat maupun daerah (Udiyanti et. al. 2014). Oleh karena itu, diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan dengan andal dan relevan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan guna dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah disajikan akan digunakan oleh para pengguna untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna.

Dalam mencapai laporan keuangan yang berkualitas, tentulah dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang baik. Sistem ini dirancang karena pemerintah sangat menyadari bahwa untuk menjaga kualitas laporan keuangan harus ada regulasi yang tidak bisa diabaikan. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) sejak dini (Alwi et. al. 2020). Dengan adanya sistem

pengendalian internal sangat memudahkan dalam melakukan pengecekan ketelitian dan keandalan pada data akuntansi. Jika sistem pengendalian internal pada suatu instansi sudah baik maka kekeliruan dan kesalahan pada pencatatan ataupun perhitungan dapat diminimalisasi sehingga dapat mengurangi terjadi kekeliruan pada pemerintah daerah.

Rukmi Juwita (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Tri Ikyarti dan Nila Aprilia (2019) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, dan Lilik Handaya Eka (2018) juga menyatakan bahwa aplikasi Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sama halnya dengan penelitian Alwi, M. Rimawan, Aliah Pratiwi (2020) tentang penerapan Standar Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Modo, dkk (2016) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Inapty dan Martiningsih (2016) yang menyatakan bahwa Standar

Akuntansi Pemerintahan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebelumnya Inapty dan Martingsih (2015) juga telah melakukan penelitian serupa dan menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu pada penelitian Tri Ikyarti dan Nila Aprila (2019) menyatakan hal yang sama yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian Edy Sujana, Komang Adi Kurniawan Saputra dan Daniel T. H Manurung (2020) dengan judul *Internal Control Systems and Good Village Governanve to Achieve Quality Village Financial Reports* menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Lailatur Rohmah, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, Mokoginta, dkk (2017) yang melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Inapty dan Martiningsih (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu berdasarkan penelitian Purnomo (2014) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lagi apakah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Sistem Pengendalian Internal, sebab Sistem Pengendalian Internal digunakan untuk menyusun laporan keuangan agar terbebas dari salah saji yang material, baik dari kecurangan maupun kesalahan. Pembeda selanjutnya terletak pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada SKPD yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman memperoleh opini WDP pada tahun 2018, hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Kabupaten Padang Pariaman.

Laporan keuangan yang berkualitas berguna untuk memberikan kualitas yang dibutuhkan oleh setiap pengguna yaitu relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dipahami (Mutiana, 2017). Kualitas laporan keuangan mempunyai tujuan yang berbeda pada pengguna internal dan eksternal. Dalam internal ditujukan sebagai

alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi, Sedangkan, pada eksternal ditujukan sebagai bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah telah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dibebankan kepadanya. Dengan berkualitasnya laporan keuangan yang disajikan pemerintah akan membantu pemerintah dalam mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP akan berpengaruh terhadap kredibilitas institusi. Kalau suatu instansi memperoleh opini WTP, itu dapat menjadi bagian kepercayaan masyarakat bahwa tata kelola pemerintahannya berjalan, prosedurnya bagus, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Hal ini sesuai dengan regulasi pemerintah pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*Agency Theory*). Teori ini menjelaskan mengenai konflik kepentingan oleh prinsipal dan agen. Dimana pemerintah sebagai agen memiliki keharusan dalam menyajikan informasi yang berguna bagi setiap pengguna informasi keuangan pemerintah, sedangkan para pengguna bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, serta baik secara langsung melalui wakil-wakilnya (Irwan, 2010 dalam Alwi et. al. 2020). Teori keagenan merupakan hubungan antara prinsipal memerintah agen dengan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan bagi prinsipal (Modo et. al. 2016)

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diidentifikasi peneliti adalah sebagai berikut.

1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk memberi bukti empiris dan mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut ini.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan literatur akuntansi yang telah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mendongkrak informasi sebagai pemikiran bagi SKPD pada pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi masukan dan pertimbangan agar meningkatkan kinerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Institusional Isomorfisme

Teori institusional sangat erat kaitannya dengan sebuah lingkungan suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Carruthers (1995) bahwa paham new institutionalism menggambarkan tentang struktur dari suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana dia berada. Jadi, jika berbicara mengenai teori institusional, pasti berbicara juga mengenai bagaimana cara suatu organisasi tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan dari pembentukan struktur organisasi adalah mencapai kesuksesan dengan diperolehnya suatu pengakuan (legitimasi) atas segala kegiatan organisasi yang telah dikerjakan untuk meningkatkan keluaran (outcome) yang efisien.

Bentuk penyesuaian diri dari suatu organisasi tersebut adalah dengan berusaha menjadi mirip dengan organisasi lain yang biasa disebut dengan isomorphism. Menurut DiMaggio & Powell (1983), isomorphism adalah suatu proses yang memberikan batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai dengan organisasi yang lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Akan tetapi, terkadang isomorphism tersebut akan memberikan tekanan institusional pada organisasi, karena mereka harus

melakukan perubahan yang sama (homogenitas) (Meyer & Rowan, 1997; Scott, 1995), dengan mereka merasa harus kerja keras untuk menjadi sama tersebut. Terdapat 3 (tiga) macam bentuk isomorphism, yakni (1) Mimetic Isomorphism adalah peniruan organisasi dengan respon ketidakpastian; (2) Coercive Isomorphism menunjukkan adalah organisasi mengambil beberapa cara untuk melakukan adopsi dikarenakan tekanan negara (pengaruh politik), organisasi yang memiliki kekuasaan lebih besar yang hal ini berdampak pada legitimasi; (3) Normative Isomorphism, berkaitan dengan norma yang berlaku (DiMaggio & Powell, 1983).

DiMaggio & Powell (1983) menjelaskan bahwa isomorfisme adalah “constraining process” yang memaksa satu unit dalam populasi untuk memiliki wujud atau sifat yang sama dengan unit yang lain, dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Isomorfisme menjelaskan tingkat kesesuaian organisasi dengan norma dan praktik yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Isomorfisme terdiri dari dua macam yaitu isomorfisme kompetitif dan institusional isomorfisme. Konsep isomorfisme kompetitif relevan dengan lingkungan bisnis atau kompetisi terbuka, sedangkan institusional isomorfis merelevan dengan persaingan bebas, seperti pada organisasi publik. DiMaggio & Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme isomorfisme yaitu mekanisme isomorfisme koersif, mimetik dan normatif.

Mekanisme isomorfisme koersif merujuk pada proses dimana organisasi mengadopsi fitur (sifat) tertentu karena paksaan (tekanan) dari negara, organisasi lain atau masyarakat (DiMaggio & Powell, 1983). Contoh isomorfisme koersif antara lain tekanan dari pemerintah pusat atau donor yaitu selaku pemberi dana. Tekanan tersebut dapat dirasakan sebagai kekuatan, persuasi atau ajakan untuk bergabung dalam kesepakatan. Isomorfisme koersif cenderung membentuk ketaatan yang semu atau sekedar ritual karena motivasinya hanya mengikuti aturan. Latar belakang isomorfisme koersif adalah tekanan formal dan informal oleh badan legislatif suatu negara, pembuat kebijakan, serta harapan masyarakat pada organisasi. Mekanisme isomorfisme mimetic terjadi karena adanya peniruan, yaitu terjadi pada saat organisasi mengalami ketidakpastian mengenai suatu operasi atau proses (DiMaggio & Powell, 1983). Dalam situasi ini sebuah organisasi akan meniru organisasi lain dengan cara melakukan benchmarking, studi banding atau memakai jasa konsultan. Lingkungan yang tidak pasti dapat menjadi kekuatan yang mendorong organisasi untuk meniru satu sama lain dalam lingkup organisasi yang sama. Selanjutnya, isomorfisme mimetik dapat berfungsi sebagai solusi praktis bagi organisasi yang tidak dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Organisasi menerapkan struktur yang hampir mirip dengan organisasi yang lebih sukses. Mekanisme isomorfisme normative berkaitan dengan paksaan atau

tuntutan muncul dari profesi. Tekanan normatif pada suatu organisasi berpotensi memiliki dampak yang penting, pengalaman individu dalam organisasi dapat mengarah pada apakah organisasi akan dianggap sah atau tidak. Kualifikasi dan karakteristik individu membantu organisasi untuk mencapai kesesuaian dalam bidang organisasi. Misalnya, bidang akuntansi tidak akan dianggap sah jika karyawannya tidak memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai akuntan. Organisasi publik menjadi salah satu subjek tekanan institusional sehingga pada umumnya organisasi publik menjadi lebih mirip. Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis kualitas informasi akuntansi berkaitan dengan institusional isomorfisme adalah regulasi, komitmen manajemen dan sumber daya manusia.

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah adalah pernyataan yang dibuat oleh pemerintah yang memberikan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan tanggung jawab entitas atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya (Rahmawati et. al. 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah laporan yang sudah memiliki struktur tentang posisi keuangan dan setiap transaksi yang telah dilakukan oleh entitas pelaporan.

Tujuan laporan keuangan menurut PP No.71/2010 mengisyaratkan bahwa laporan keuangan digunakan sebagai akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; dan manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan laporan keuangan penting baik pada organisasi swasta maupun pada pemerintahan sehingga pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Kriteria tersebut di atas merujuk pada informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi

akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Unsur-unsur kualitas dalam laporan keuangan pemerintah telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada PP No. 71 Tahun 2010 yaitu :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (PP No. 71 Tahun 2010). Karakteristik informasi yang relevan adalah memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan (PP No. 71 Tahun 2010). Informasi yang andal memiliki karakteristik berikut yaitu, penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*) dan netralitas.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (PP No. 71 Tahun 2010).

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud (PP No. 71 Tahun 2010).

3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi merupakan pedoman dalam menerapkan perlakuan akuntansi yang menyusun laporan keuangan dengan tujuan pelaporan kepada setiap pengguna laporan keuangan (Mardiasmo 2002).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Menurut PP No 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini diberlakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang tersaji dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan 12 (dua belas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, yaitu :

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (PP No. 71 Tahun 2010).

2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (PP No. 71 Tahun 2010).

3. PSAP No, 03 Laporan Arus Kas

Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi (PP No. 71 Tahun 2010).

4. PSAP No, 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan (PP No. 71 Tahun 2010).

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010).

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010).

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap (PP No. 71 Tahun 2010).

8. PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan (PP No. 71 Tahun 2010).

9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut (PP No. 71 Tahun 2010).

10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan (PP No. 71 Tahun 2010).

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan (PP No. 71 Tahun 2010).

12. PSAP No. 12 Laporan Operasional

Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (PP No. 71 Tahun 2010).

4. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Sukmaningrum (2012), Sistem Pengendalian Internal adalah kegiatan yang melakukan pengendalian dengan tujuan untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan informasi atas pengelolaan sistem informasi.

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

- a. Pengendalian umum, meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.
- b. Pengendalian aplikasi, meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal menjelaskan bahwa Standar Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 menyebutkan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menjelaskan 5 (lima) unsur dari SPIP yang dimaksud agar dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral Instansi Pemerintah, yaitu :

a. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui;

(1) Penegakan integritas dan nilai etika;

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan: menyusun dan menerapkan aturan perilaku;

memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah; menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis (PP No. 60 Tahun 2008).

(2) Komitmen terhadap kompetensi;

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan: mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2008).

(3) Kepemimpinan yang kondusif;

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan: mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan; menerapkan manajemen berbasis kinerja; mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah; melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan (PP No. 60 Tahun 2008).

(4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan: menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah; memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah; memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah; melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. Penyusunan struktur organisasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008).

(5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah; pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP (PP No. 60 Tahun 2008).

(6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai; penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Penyusunan dan penerapan kebijakan

pembinaan sumber daya manusia berpedoman pada peraturan perundangundangan (PP No. 60 Tahun 2008).

- (7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus: memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2008).

b. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Hal ini dilakukan dengan menetapkan;

- (1) Tujuan Instansi Pemerintah

Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah wajib dikomunikasikan kepada

seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko (PP No. 60 Tahun 2008).

(2) Tujuan pada tingkatan kegiatan

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurangkurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah; saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya; relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah; mengandung unsur kriteria pengukuran; didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya (PP No. 60 Tahun 2008).

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurangkurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; kegiatan pengendalian yang

dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan (PP No. 60 Tahun 2008).

d. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus (PP No. 60 Tahun 2008).

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui

(1) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan

tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas (PP No. 60 Tahun 2008).

(2) Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini (PP No. 60 Tahun 2008).

(3) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan (PP No. 60 Tahun 2008).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Rukmi Juwita (2013)	Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan	Independen : Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2.	Tri Ikyarti dan Nila Aprilia (2019)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian	Independen : Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

		internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma	Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	di Kabupaten Seluma
3.	Sintike Mentari Modo, David Paul Elia Saerang, dan Agus Tony Poputra (2016)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud)	Independen : Pengawasan Internal, Pemahaman tentang Peraturan, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi. Dependen : Kualitas Informasi Laporan	1. Pengawasan Internal (X1) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y). 2. Pemahaman tentang Peraturan (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y). 3. Kapasitas Sumber Daya

			Keuangan	Manusia (X3) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y). 4. Penggunaan Teknologi Informasi (X4) berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) 5. Komitmen Organisasi (X5) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y).
4.	Novtania Mokoginta, Linda	Pengaruh Sistem Pengendalian	Independen : Sistem Pengendalian	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

	Lambey, Winston Pontoh (2017)	Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
5.	Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan	Independen : Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dependen : Kualitas Laporan	Tidak ada hubungan moderasi antara penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

		Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tuai)	Keuangan	
6.	Putriasri Pujanira, Abdullah Taman (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	Independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	(1))Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2)Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3)Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (4)Kompetensi Sumber Daya

				Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama- sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
7.	Edy Sujana, Komang Adi Kurniawan Saputra, Daniel T. H Manurung (2020)	Internal Control Systems and Good Village Governance to Achieve Quality Village Financial Reports.	Independen : Sistem Pengendalian Internal, Good Village Governance Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara sistem pengendalian internal dan good village governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
8.	Erin Olayinka; Okoye, Lawrence	International Public Sector Accounting Standards	Independen : Penerapan Standar Akuntansi	Menunjukkan bahwa adopsi IPSAS berpengaruh positif

	Uchenna; Modebe, Nwanneka J. & Ogundele Olaoye (2016)	(IPSAS) Adoption and Quality of Financial Reporting In The Nigerian Public Sector	Sektor Publik Internasional (IPSAS) Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan sektor publik Nigeria
9.	Robert O. Opanyi (MBA, BBA, CPA) (2016)	The Effect of Adoption of International Public Sector Accounting Standards on Quality of Financial Reports in Public Sector in Kenya	Independen : Adopsi Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Menunjukkan bahwa adopsi IPSAS berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan sektor publik Kenya

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP No 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi

Pemerintahan merupakan standar yang memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang telah disusun dengan memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi penggunanya (Adhi et. al. 2013).

Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang ada. Pemerintah harus menjadikan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas agar terciptanya tata pemerintahan yang baik (Sanjaya et. al 2017). Penyusunan laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuannya. Hal ini dilakukan mengingat Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan hal penting agar kualitas laporan keuangan yang telah disajikan dapat meningkat kualitasnya, apabila kualitas dalam laporan keuangan sudah baik maka akan memiliki dampak pada tata kelola pemerintahan agar semakin baik pula (Darmawan 2018).

Hasil penelitian (Rukmi Juwita 2013) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian (Putriasri Pujanira, Abdullah Taman 2017) yang juga memberikan hasil Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan juga dengan penelitian Tri Ikyarti dan Nila Aprilia (2019) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sama halnya dengan penelitian Alwi, M. Rimawan, Aliah Pratiwi (2020) tentang penerapan Standar Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Hubungan Antara Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

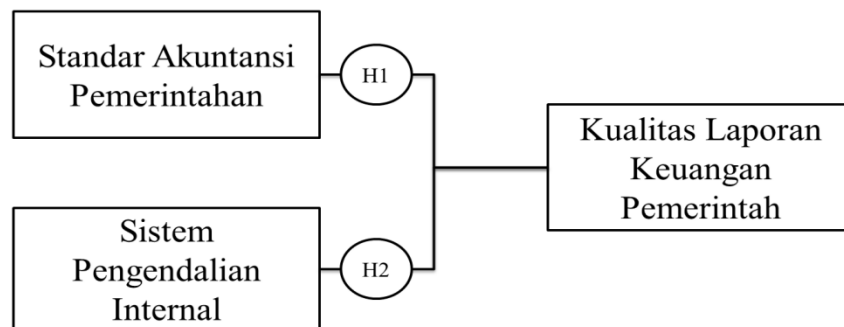
Laporan keuangan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelaporannya dengan menguatkan sistem pengendalian internal yang ada pada setiap instansi yang menyajikan laporan keuangan. Penguatan ini dilakukan dengan menguatkan pengawasan, memisahkan tupoksi dengan jelas, mendelegasikan wewenang, mendokumentasikan transaksi yang lengkap dan sah, melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, lalu menguji sistem pengendalian internal yang telah ada (Darmawan 2018).

Penerapan sistem pengendalian internal yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang baik pula. Dengan penerapan sistem pengendalian internal diharapkan dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan agar di masa mendatang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan sebagai alat pengambil keputusan, serta dapat mencegah timbulnya kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merugikan suatu organisasi (Udiyanti 2014).

Hasil penelitian (Tri Ikyarti dan Nila Aprilia 2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Edy Sujana, Komang Adi Kurniawan Saputra, Daniel T. H Manurung 2020) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Selanjutnya Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Lailatur Rohmah, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori dan hubungan antar variabel yang telah penulis jelaskan diatas, kerangka konseptual yang dapat digambarkan untuk mengetahui antara variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pada hipotesis pertama (H1) menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang berperan untuk menjamin laporan keuangan dapat disusun guna

memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi setiap penggunaannya. Hipotesis kedua (H2) menguji pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal merupakan sistem yang memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, memastikan keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah.

E. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah penulis jelaskan diatas, hipotesis penelitian yang akan penulis ajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $5.346 > t_{tabel}$ sebesar 1.66342.
2. Sistem Pengendalian berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0.009 < 0.05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2.684 > t_{tabel}$ sebesar 1.66342.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, dengan kerendahan hati peneliti menyadari betul bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian, karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan

yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

2. Peneliti dalam mendapatkan data dari responden tidak dapat bertemu responden secara langsung dan hanya diperbolehkan untuk dititipkan kerana kesibukan dari responden itu sendiri serta peraturan dari pemerintah bahwa dalam penelitian tidak diperbolehkan mengganggu jam kerja pegawai.
3. Penelitian ini meneliti fenomena pada tahun 2018, sehingga peneliti harus mencari responden yang memiliki masa kerja minimal 5 tahun.
4. Responden pada penelitian ini seharusnya hanya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, namun peneliti mengambil responden seluruh SKPD Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan jumlah responden yang kurang jika hanya mengambil satu SKPD.
5. Pemahaman akuntansi pemerintahan peneliti masih minim.

C. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya agar memperluas lingkup objek penelitian yang meliputi beberapa SKPD di tiap Kabupaten/Kota.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel independen lain diluar variabel dalam penelitian ini, seperti Kapasitas Sumber Daya

Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, dan variabel lainnya.

3. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah metode penelitian dengan metode wawancara atau terlibat tatap muka langsung dengan responden. Hal ini dilakukan agar responden dapat lebih memahami setiap pertanyaan kuesioner yang diberikan peneliti, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual). *JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK)*, 5(3), 93-111.
- Alwi, A., Rimawan, M., & Pratiwi, A. (2020). ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN SISTIM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *INVOICE: JURNAL ILMU AKUNTANSI*, 2(2), 79-89.
- Armel, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Darmawan, A. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.
- Fikri, M. A., Inapty, B. A., & Martiningsih, S. P. (2015). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian

- intern sebagai variabel moderating (Studi empiris pada SKPD-SKPD di Pemrov. NTB). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, 45-76.
- Fitrawansah, F. (2015). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Fitria, Lusi (2012). *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance (GG) Dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, I. (2016). Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya. *Semarang: Yoga Pratama*.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2010). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 53-64.
- Hidayat, R. (2015). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 9(2), 2019.

- Inapty, M. A. F. B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating (Studi empiris pada SKPD di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Juwita, R. (2013). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201-214.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 7(2).
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2).

- Musianto, L. S. (2004). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 4(2), pp-123.
- Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida, Z. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern, teknologi informasi, Kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap Kualitas laporan keuangan (studi pada satker di lingkungan kementerian agama kabupaten aceh utara). *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)(Darussalam Journal of Economic Perspectives)*, 3(2), 151-167.
- Nahartyo, E., & Utami, I. (2016). Panduan praktis riset eksperimen. *Jakarta: PT. Indeks*.
- Opanyi, R. O. (2016). The effect of adoption of international public sector accounting standards on quality of financial reports in public sector in Kenya. *European Scientific Journal*, 12(28), 161-187.
- Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016. Diakses pada 12 Juni 2021, dari <http://jdih.padangpariamankab.go.id/>
- PP No. 60 Tahun 2008. Diakses pada 14 April 2021, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876>
- PP No. 71 Tahun 2010. Diakses pada 12 April 2021, dari <http://www.djpk.depkeu.go.id>

- Purnomo, B. S. (2014). Pengaruh sistem pengendalian internal dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276-288.
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2)
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.
- Sanjaya, A., Rasuli, M., & Haryani, E. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Skpd Ka* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 2.
- Septo Nugroho, B., & MM, A. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sujana, E., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 98-108.
- Udiyanti, N. L. N. A., Atmadja, A. T., SE, A., Darmawan, N. A. S., & SE, A. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Wahyuni, N. E. (2016). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Perspektif Teori Institusional: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1).
- Winarni, D., & Zamakhsyari, L. (2021). ANALISIS KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MELALUI PENDEKATAN TEORI INSTITUSIONAL ISOMORFISME. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 37-46.